

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Tugas : Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
  - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengarahan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sekolah menengah atas;
  - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sekolah menengah kejuruan;
  - f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan khusus;
  - g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kebudayaan;
  - h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketenagaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan kebudayaan;

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, bidang kebudayaan dan bidang pembinaan ketenagaan;
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan Cabang Dinas;
- l. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- m. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan dan Sasaran) :
- 1. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca
  - 2. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi
  - 3. Harapan Lama Sekolah
  - 4. Rata-Rata Lama Sekolah
  - 5. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
  - 6. Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
  - 7. Nilai Dimensi Warisan Budaya
  - 8. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
  - 9. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Uraian / penjelasan Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
T.1	Tujuan : Meningkatnya Tingkat Intelektualitas dan Pendidikan Masyarakat Serta Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persentase	<p>Definisi Operasional : Persentase Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi membaca/numerasi): Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Peserta didik yang menjadi subjek perhitungan adalah peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag, kecuali sekolah terbuka.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan : (Jumlah Satuan Pendidikan yang mencapai SKM literasi membaca : Total jumlah atuan Pendidikan yang diukur) * 100%</p> <p>Sumber Data : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>Tipe Indikator : -Positif / Negatif</p>
T.1.1		Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persentase.	<p>Definisi Operasional : Persentase Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi membaca/numerasi): Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Peserta didik yang menjadi subjek perhitungan adalah</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				<p>peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag, kecuali sekolah terbuka.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan : (Jumlah Satuan Pendidikan yang mencapai SKM Numerasi membaca : Total jumlah Satuan Pendidikan yang diukur) * 100%</p> <p>Sumber Data : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>Tipe Indikator : -Positif / <del>Negatif</del></p>
T.1.2		Harapan Lama Sekolah	Tahun	<p>Definisi Operasional : Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah estimasi jumlah tahun yang dapat diharapkan akan dijalani oleh seorang anak untuk mengikuti pendidikan formal, mulai dari usia masuk sekolah (biasanya 7 tahun), jika mengikuti pola partisipasi pendidikan yang berlaku saat ini.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan : (<math>HLS = \sum (i * P(i))</math>) Dimana:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLS: adalah Harapan Lama Sekolah.</li> <li>• i: adalah umur individu (dimulai dari usia masuk sekolah, misalnya 7 tahun).</li> <li>• P(i): adalah proporsi penduduk pada umur i yang bersekolah.</li> </ul> </p> <p>Sumber Data : Badan Pusat Statistik</p> <p>Tipe Indikator : -Positif / <del>Negatif</del></p>
T.1.3		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Definisi Operasional :

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				<p>Ukuran yang menunjukkan berapa tahun rata-rata penduduk suatu wilayah telah menempuh pendidikan formal. RLS biasanya dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena diasumsikan bahwa pada usia tersebut, pendidikan formal seseorang telah selesai. RLS digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat dan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Rumus /Formulasi</p> <p>Perhitungan :            (Total Tahun Pendidikan) / (Jumlah Penduduk)            Dimana: Total Tahun Pendidikan: Jumlah seluruh tahun pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk dalam Pendidikan formal.            Jumlah Penduduk: Jumlah total penduduk pada usia yang dihitung (biasanya 25 tahun ke atas).</p> <p>Sumber Data :            Badan Pusat Statistik</p> <p>Tipe Indikator :            -Positif / <del>Negatif</del></p>
T.1.4		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	<p>Definisi Operasional :            Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah ukuran komposit yang menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan suatu daerah atau negara, berdasarkan tujuh dimensi utama yang mencerminkan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan :  <math>IPK = \sum (\text{Bobot Dimensi} * \text{Nilai Dimensi})</math>            Dimana:            IPK: adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan.            Bobot Dimensi: adalah nilai bobot yang diberikan untuk setiap dimensi, yang mencerminkan pentingnya dimensi tersebut dalam pembangunan kebudayaan.</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				<p>Nilai Dimensi: adalah nilai yang diperoleh dari perhitungan indikator-indikator dalam setiap dimensi, yang telah dinormalisasi terlebih dahulu.</p> <p>Sumber Data :  <a href="https://ipk.kemenbud.go.id/nasional">https://ipk.kemenbud.go.id/nasional</a></p> <p>Tipe Indikator :            -Positif / <del>Negatif</del></p>
S.1	Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Indeks	<p>Definisi Operasional :            Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ukuran komposit (gabungan beberapa indikator) yang menggambarkan tingkat pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan :            (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar * bobot mutu (20%)) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar * bobot penerima layanan (80%))</p> <p>Sumber Data :            Kemendikdasmen</p> <p>Tipe Indikator :            -Positif / <del>Negatif</del></p>
S.2	Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Budaya	Nilai Dimensi Warisan Budaya	Nilai	<p>Definisi Operasional :            Nilai Dimensi Warisan Budaya adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang mencerminkan tingkat keberadaan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengakuan warisan budaya (baik benda maupun takbenda) dalam suatu wilayah, berdasarkan sejumlah dimensi seperti identitas budaya, nilai sejarah, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan pelindung budaya.</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				<p>Rumus /Formulasi Perhitungan :            ( Jumlah Skor per dimensi : Jumlah Dimensi ) ×25</p> <p>Sumber Data :  <a href="https://ipk.kemenbud.go.id/nasional">https://ipk.kemenbud.go.id/nasional</a></p> <p>Tipe Indikator :            -Positif / <del>Negatif</del></p>
S.3	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	<p>Definisi Operasional :            Nilai IKM dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dari sejumlah pernyataan ukuran pelayanan publik yang diberikan kepada sejumlah responden yang berkunjung dalam periode tertentu</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan :            (Total Nilai Presepsi Per Unsur : Total Unsur) * Nilai Penimbang</p> <p>Sumber Data :            Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Tipe Indikator :            -Positif / <del>Negatif</del></p>
S.3.1		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	<p>Definisi Operasional :            Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib diterapkan dalam manajemen kinerja Perangkat Daerah. Ruang lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan capaian Akuntabilitas Kinerja.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan :</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				Skor Penilaian Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat  Sumber Data : LHE Inspektorat  Tipe Indikator : -Positif / Negatif

Plt. Kepala,  
  
**Arni S.Pd., M.Pd**  
 Kepala Tk. I IV/b  
 NIP. 19701231 199702 1 008

**Ket.**

1. Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya diambil berdasarkan yang tertuang dalam ranwal Renstra 2025 – 2029.
2. Definisi Operasional : Definisi yang menjelaskan secara lengkap terkait Indikator tujuan / sasaran.
3. Rumus / Formulasi Perhitungan : Cara menghitung capaian dari Indikator tujuan / sasaran.
4. Sumber data : Instansi / Perangkat Daerah yang melakukan perhitungan data capaian Indikator.
5. Tipe Indikator :
  - **Positif** : Capaian makin besar makin baik.
  - **Negatif** : Capaian makin kecil makin baik.